

Jurnal

by Emmy Dewi Pramitha

Submission date: 27-Jan-2023 11:39AM (UTC+0700)

Submission ID: 2000330343

File name: Jurnal_Emy_Rev1.docx (57.85K)

Word count: 4550

Character count: 31060

PERAN PEMERINTAH DESA KETAPANG DALAM PENGEMBANGAN BUMDes
KALIFOUR

Emmy Dewi Pramita II, Lailul Mursyidah
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email: emydpl5@gmail.com | lailulmursyidah@umsida.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to describe the Role of the Ketapang Village Government in the Development of Village-Owned Enterprises (BUMDes), as well as to describe several factors in implementing the role carried out by the Ketapang Village Government, Tanggulangin District, Sidoarjo Regency. This study uses a qualitative approach, with triangulation data collection techniques and interactive analysis techniques by Miles and Huberman. The results of the study show that there are four roles that have been carried out by the Ketapang Village Government, namely: as a Regulator the Government provides direction to harmonize development as stipulated through Village Regulation Number 08 of 2020, as a dynamist of the village government has a seriousness in providing direction, able to invite the community to use the awakening of community participation to actively participate in every development until the realization of Kalifour, as a Village Government Facilitator engaged in assistance through supervision as well as in the field of funding through receiving financial assistance from BUMDes Della Mandiras Kalifour manager and as a Catalyst for the village government located as an institution that accelerates potential development village. In carrying out its role, it cannot be separated from supporting factors, namely the availability of facilities, the existence of special policies regarding administrators, the existence of guidance and supervision. Meanwhile, the inhibiting factor found is the lack of awareness of residents to maintain the cleanliness of the environment, especially the Affaour River.

Keywords: The Role, Village Government, Kalifour

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini memaparkan Peran Pemerintah Desa Ketapang Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta memaparkan beberapa faktor pelaksanaan peran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data triangulasi dan teknik analisis interaktif Miles and Huberman. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa terdapat empat peran yang telah dijalankan oleh Pemerintah Desa Ketapang yaitu : sebagai Regulator Pemerintah memberikan pengarahan guna menyelaraskan penyelenggaraan pembangunan yang ditetapkan melalui Peraturan desa Nomor 08 Tahun 2020 ,sebagai Dinamisator pemerintah desa mempunyai kesungguhan dengan memberikan pengarahan, dapat mengajak warga guna terbiasanya pan isipasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan hingga terwujudnya Kali four sebagai fasilitator pemerintah desa tergerak dibidang pembangunan melalui pengawasan serta dibidang pembiayaan atau pendanaan lewat penerimaan bantuan dana kepada BUM Des Della Mandiri sebagai pengelola Kali four dan sebagai Kalifour pemerintah desa berkecukupan dalam lembaga yang mampu mencapai pengembangan potensi desa. Dalam menjalankan perannya juga tidak lepas dari Faktor pendukung yaitu kesediaan fasilitas fasilitas, adanya kebijakan khusus mengenai penurus, adanya bimbingan dan pengawasan. Sedangkan untuk faktor penghambat yang dijumpai adalah minimnya kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan khususnya sungai affaour.

Kata kunci Peran Pemerintah Desa Kalifour

PENDAHULUAN

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membuat Pemerintah Desa bersama masyarakat lebih ekspresif disaat membangun desa dengan segala sumber daya yang dimilikinya. Pembangunan secara fisik bukan satu satunya tujuan utama, melainkan membangun kesadaran bagi masyarakat guna menuju pemberdayaan masyarakat secara luas. Membangun potensi sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakat penting digalakan kembali karena hal ini merupakan modal utama bagi terwujudnya ciri khas budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian kita semestinya mengidentifikasi potensi masyarakat yang selanjutnya dikembangkan. Apabila upaya ini dilakukan maka pemberdayaan merupakan usaha untuk membangun kekuatan dengan upaya memotivasi sekaligus membangkitkan kelebihan yang dimiliki dan berusaha untuk mengembangkannya kepada masyarakat yang terdampak masalah social ekonomi. Pemberdayaan mempunyai makna menumbuhkan sumber daya, peluang, wawasan serta skill masyarakat guna menumbuhkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka. Pemberdayaan memiliki kontribusi sebagai peluang bagi Japisan masyarakat yang memiliki kewenangan sebagai pihak pembuat kebijakan atau pengambilan keputusan dari sebuah kelompok masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga termasuk penguatan individu baik anggota masyarakat maupun pranata-pranata masyarakat. Pendekatan yang paling penting dalam konsep pemberdayaan ini yaitu meletakkan masyarakat bukan sekedar sebagai obyek akan tetapi juga sebagai subyek atau pelaku pembangunan. Majunya suatu negara bertumpu pula oleh desa, karena tidak mungkin suatu negara dapat berkembang dengan mengabaikan kondisi provinsi yang tidak berkembang pula, pun juga sebaliknya tidak ada provinsi yang maju tanpa diiringi dengan kemajuan suatu kabupaten/kota, begitu juga suatu kabupaten atau kota yang berkernbang sangat tidak mungkin tanpa peran desa/kelurahan yang maju (Larasati, 2019). Hal ini dengan kata lain bahwa dasar dari maju tidaknya suatu negara bergantung oleh kemajuan desa. Produktivitas dan berkembangnya suatu desa bergantung pula atas terlaksananya pembangunan. Dalam hal ini suatu pembangunan desa mempunyai arah dalam menumbuhkan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat sekaligus meminimalisir kemiskinan dengan jalan menyediakan kebutuhan dasar, pembangunan fasiiitas desa, produktivitas perekonomian lokal, dan pemberdayaan sumber daya alam serta lingkungan yang berkesinambungan (Alam, 2006). Dengan demikian penataan pembangunan desa, tidak bisa lepas atas partisipasi pemerintah desa pada pengerjaan dan mengembangkan BUMDes, hal ini disebabkan masih menjadi bagian dari keadaan perekonomian masyarakat. Peningkatan dan pengembangan desa sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. BUMDes dimungkinkan menjadi salah satu jalan pintas untuk menggerakkan potensi masyarakat desa. Atas dasar perundang undangan tersebut peran pemerintah hubungannya dengan mengakomodir potensi desa dan penyediaan keinginan masyarakat dengan memberikan support melalui badan usaha yang mampu meningkatkan dan mengoptimalkan ekonomi daerah. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 tahun 2017 tentang Sungai yaitu alur atau wadah air alam dan/atau buatan seperti saluran pengaliran air beserta air di dalamnya, awal dari itu hingga muara yang terbatasi katar kirinya dengan

27
Sempadan Pengelolaan sungai dilaksanakan dengan komprehensif serta berorientasi lingkungan dengan maksud untuk menciptakan nilai fungsi sungai yang berkisanambungan. Kesuksesan pengelolaan sungai sangat tergantung pada peran masyarakat. Sungai sudah tidak lagi identik dengan pedesaan namun di kota sekalipun dijumpai dikawasan perkotaan. Dilain sisi kawasan sungai mempunyai fungsi sebagai pemenuhan kelangsungan hidup manusia. Keberadaan sungai bukan sekedar hanya aliran air semata, namun juga dapat difungsikan sebagai antisipasi banjir sertajuga dapat diwujudkan sebagai wahana wisata sebagai objek baru bagi masyarakat. Kondisi sungai dapat kita manfaatkan dari segala aspek perspektif ditinjau dari kelestariannya dan kebersihannya, maka besar sekali manfaat yang bias dirasakan dari sungai tersebut. Namun kenyataannya fenomena yang sering dijumpai adalah rusak dan kotornya hantaran sungai telah menjadi beralih fungsi yaitu sebagai tempat pembuangan sampah serta saluran pembuangan limbah oleh warga sekitar. Hal ini menunjukkan disebabkan oleh minimnya pemahaman dan wawasan masyarakat terhadap perlunya menjaga kebersihan lingkungan yang mempunyai peran penting atas kesehatan serta kelestarian lingkungan. Terbukti pula bawasannya sungai dijadikan tempat pembuangan sampah. Seperti sungai yang berlokasi di desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yaitu sungai affour sepanjang 1000 meter yang membentang di tengah-tengah desa dapat dikategorikan masih kotor dan belum adanya tindakan atau pemanfaatan terhadap sungai itu sendiri. Sedangkan di desa Ketapang tidak sedikit warga yang bekerja sebagai petani sawah. Sudah sejak dulu terdapat ikatan antara manusia dengan sungai. Sekitar 50 % warga desa Ketapang bermata pencaharian sebagai petani sawah. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran sungai sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat terlebih bagi para petani guna pengairan sawahnya, apabila air sungai dalam keadaan kotor dan tercemar tentu akan mempengaruhi kualitas sawah itu sendiri. Pada tahun 2020 Pemerintah Desa Ketapang menyusun Peraturan Desa Ketapang Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDes) periode Tahun 2021 - 2026, dalam RPJMDes ini tertuang untuk revitalisasi pemanfaatan sungai untuk meningkatkan kualitas lingkungan di desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah Desa Ketapang juga area taman wisata desa yang kedepannya akan dikelola oleh BUM Des Delta Mandiri desa Ketapang. Menurut Arif dalam Adhawati (2019) Peran Pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat terdapat empat peran yaitu 1) Peran Pemerintah sebagai Regulator, 2) Peran Pemerintah sebagai Katalisator, 3) Peran Pemerintah sebagai Dinamisator dan 4) Peran Pemerintah sebagai Fasilitator (Arif dalam Adhawati 2012)(Raintung et al., 2021).

2
Disebutkan terdapat penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya terutama terkait dengan peran pemerintah dalam pengembangan BUMDes. Para peneliti tersebut adalah membahas peran pemerintah desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di desa Tlekung Kecamatan Junrejo Batu (Laru & Suprojo, 2019), membahas tentang peranan pemerintah desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa di desa Ulu Balang Kecamatan Salomeko Kabupaten Bone (Anwar, 2020),

dan yang terakhir mengupas masalah andil pemerintah desa guna mengoptimalkan ²³ **penelitian asl** daerah **melalui Badan Usaha MMDK desa di desa** Tanekernan Kabupaten Muaro Jambi (Yani et al., 2019). Kesamaan pada penelitian ini yaitu sama sama menerapkan penelitian metode kualitatif dengan fokus peneltian tentang peran pemerintah dalam pengembangan BUMDes. Adapun perbedaan peneltian ini dengan para peneliti terdahulu adalah objek penelitian yang dilakukkann peneliti yaitu peran pemerintah dalam mengembangkan kalifour sebagai asset BUMDes desa Ketapang Kabupaten Sidoarjo Kecamatan TangguJangin

Fokus penelitian ini di desa Ketapang kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, yang telah memilih sungai affour untuk diwujudkan menjadi Kalifour sebagai salah satu BUMDes desa Ketapang yang diharapkan menjadi sebuah solusi alternatif untuk melindungi, menjaga kebersihan lingkungan khususnya di area bantaran sungai dan menggerakkan masyarakat desa.

Tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu guna mengetahui ¹ **peran pemerintah desa** Ketapang **dalam** peningkatan **Badan Usaha MMDK Desa (BUMDes)** Kalifour **serta** menjelaskan indikator indikator **yang** menghambat maupun pendukung **peran pemerintah desa dalam** pemberdayaan **Badan Usaha MMDK Desa (BUMDes) pada Pengelola** Kali four **di desa** Ketapang **kecamatan** Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. **Dari** kedua **tujuan penelitian** dimaksud, dengan ini **penelitian ini** menerapkan **teori yang** berkaitan **dengan** peran **Pemerintah** Nurdin et al., 2014) .Peran sesuatu hal yang dinamis kedudukannya ³ **(status) apabila** **sesorang** melakanakan **hak dan kewajibannya** seiring **dengan** bagiannya, maka **dengan** kata lain sebagai pemegang suatu peranan (Soekanto, 2002). Definisi lain disampaikan oleh Mayor Palak (Verawati, 2003) ia mengemukakan bahwa : Peranan yaitu sebuah tindakan yang diinginkan dari pihak antar interaksi sosial tertentu yang berkaitan dengan status sosial tertentu. Peranan adalah suatu dasar **persepsi** yang dipakai oleh tiap tiap orang yang bersosialisasi pada sebuah kelompok atau organisasi guna bertindak pada sebuah aktivitas tentang tugas serta kewajibannya. Pada realitanya .bisa jadi jelas dan bias jadi tidak begitu jelas. Paparan kejelasan ini akan berdampak pula pada tingkat kejelasan peranan seseorang. Pemerintah daerah adalah sebuah Lembaga yang mempunyai hak dan tugas dalam membuat **peraturan** dalam bentuk penerapan hukum dan peraturan peraturan di wilayah tertentu dimana wilayah dimaksud dibawah kekuasaan mereka. Mekan luas pemerintah dalam hal ini didefenisikan sebagai bentuk lembaga yang bekerja dengan tugas melaksanakan sebuah sistem pemerintahan eksekutif, legislatif dan yudikatif (Nur Amalia Reska, 2019).

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mewujudkan kawasan sungai affour menjadi sebuah tempat/destinasi diantaranya pembersihan sampah sungai affour desa Ketapang, Kegiatan pembersihan ungai affour desa Ketapang menjadikan agenda rutinan setiap 3 (tiga bulan sekali dalam setiap tahunnya, yang dilaksanakan oleh Pernerintah Desa Ketapang, PKK desa Ketapang, Karang Taruna desa Ketapang, RT, RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan masyarakat desa Ketapang, yang kedua pemanfaatan sarnpah sungai/ranaman liar sebagai kompos. Pemanfaatan sarnpah sungai sebagai kompos dilakukan warga desa Ketapang yang dikoordinir oleh sargas lingkungan desa Ketapang. Sampah sungai terutama tanaman liar seperti enceng gondok dan kangkung serta tanaman liar yang tumbuh disungai tidak

serta merta. Upaya ketiga menjadikan sempadan sungai sebagai area penghijauan ,pusat edukasi dan wahana asri rekreasi asri. Di sepanjang sempadan sungai affour sudah tidak ada lagi bangunan liar, pemukiman serta perdagangan di areal sempadan sungai sudah tidak ada lagi. Pemerintah desa Ketapang bekerjasama dengan beberapa elemen masyarakat desa dari PKK, Karang Taruna desa Ketapang, RT, RW, Tokoh masyarakat untuk turut serta merevitalisasi sempadan sungai untuk menanam bunga, tanaman toga, pohon ketapang maupun pohon ketapang kencana yang merupakan ikon desa Ketapang yang sudah dilaksanakan karena merupakan agenda terpenting bagi desa sehingga sempadan sungai menjadi indah dan tidak ada lagi masyarakat desa Ketapang yang membuang sampah di sungai, karena warga desa sendiri yang merawat tanaman tersebut.

Dari berbagai upaya sebagaimana tersebut diatas yang dilakukan oleh pemerintah desa merupakan indikator indikator dalam mewujudkan Kalifour sebagai wahana yang mempunyai nilai fungsi baik secara nilai tatakelola maupun materiil. Namun juga tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan hal ini dapat dilihat dari masih sulitnya untuk memberi pemahaman kepada mereka dalam menjaga kebersihan sungai dari sampah, minimnya anggaran yang hanya bersumber dari APBDes mempengaruhi percepatan infrastruktur seperti yang diinginkan.

21

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data yang disajikan meliputi struktur organisasi, geografis objek, keadaan masyarakat, sarana dan prasarana. Lokasi penelitian dilakukan di desa Ketapang jalan Ngaban KecamatanTanggulangun Kabupaten Sidoarjo. Untuk Teknik penentuan informan peneliti menggunakan teknis Purposive sampling. Peneliti menunjuk informan dimana mereka dapat memberikan informasi informasi yang diperoleh dalam penelitian. Sedangkan informan pada penelitian ini adalah kepala desa Ketapang, sekretaris desa Ketapang dan Pengurus BUM Des Delta Mandiri serta 3 orang warga desa. Adapun data yang diterapkan yaitu jenis data sekunder sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu panduan wawancara (*Interview Guide*), dan Catatan lapangan (*Field Note*). Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, Penyajian Data dan penarikan kesimpulan/Verifikasi Sugiyono, (2010).

HASIL, DAN PEMBAHASAN

² Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan BUMDes Kalifour di desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

Tujuan awal dalam pembentukan Kalifour sebagai BUMDes diantaranya adalah untuk menjaga ekosistem sungai menjalin kerukunan dan kerjasama warga desa Ketapang dan pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana lumpur Lapindo Sidoarjo dan pasca pandemic covid 19. Melalui APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja desa) yang kemudian masyarakat tergerak untuk mewujudkan kalifour dengan harapan mampu mengoptimalkan produktivitas warga desa dari segi perekonomian, sumber daya alam, dan sumber dayanya. Pemanfaatan sungai yang optimal, menjadikan kelestarian air sungai dan lingkungan dapat terjaga, hal ini sudah menjadi pembahasan disaat penyusunan peraturan desa Ketapang. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai. Hal ini disebabkan karena masih ditemukannya sampah yang dibuang secara sembarangan disekitar sungai kawasan Ketapang. dilain sisi keterbatasan SOM dan hal ini tenaga kerja untuk merawat keberlangsungan ekosistem sekitar sungai. Pendirian Kali four secara spesifik bertujuan melestarikan lingkungan yang bebas dari sampah yang berada di sungai serta meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya hidup bersih serta menjadikan area sempadan sungai sebagai area penghijauan, pusat edukasi, wahana rekreasi alam dan asri di desa Ketapang. Tujuan lainnya adalah membuka peluang usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar mendukung perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki sekaligus kebutuhannya. Maka dari itu dibutuhkan keterlibatan Pemerintah desa sebagai penyelenggara, pembuat dan pemangku kebijakan pemerintah desa, pemberi sarana serta sebagai mediator bagi warga. Andri²⁴ pemerintah desa pada pengembangan BUMDes kalifour dapat ditinjau dari seberapa besar andri²⁴ pemerintah desa baik sebagai regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator. Dalam rangka bisa membahas lebih dalam seberapa keterlibatan pemerintah desa dengan demikian peneliti mengutip gagasan yang disampaikan oleh Arif dan Adhewati (2012) sebagai berikut :

Peran Pemerintah sebagai Regulator

Sebagai regulator Pemerintah mengarahkan guna menyelaraskan pelaksanaan pembangunan (Membuat aturan aturan berkaitan efektifitas dan peraturan administrasi pembangunan). Peran regulator pemerintah desa merumuskan peraturan dan rencana rencana terkait pengembangan Kalifour, memberikan gambaran yang kemudian dapat dipahami oleh masyarakat sebagai indikator agar dapat mengatur setiap agenda pelaksanaan pemberdayaan kalifour yang dikelola oleh BUMDes Delta Mandiri. Peran pemerintah dalam pengembangan kalifour telah diimplementasikan melalui Peraturan desa Nomor 08 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Desa (RPJMDes) periode Tahun 2021 - 2026, dalam RPJMDes ini tertuang untuk revitalisasi pemanfaatan sungai untuk meningkatkan kualitas lingkungan di desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah desa Ketapang serta area taman rekreasi desa yang kedepan akan berdayakan oleh BUM Des " Delta

Mandiri " desa Ketapang.

Melalui regulasi pemerintah ini membawa dampak terhadap upaya-upaya salah satunya menjaga kebersihan di kawasan bantaran sungai .Dalam pengelolaan Kalifour pemerintah desa telah berkoordinasi dengan terbentuknya BUMDes Delta Mandiri sekaligus memberikan penyuluhan dengan memberdayakan pemanfaatan sampah sungai sebagai kompos. Menjadika area sempadan sungai sebagai area penghijauan,wahana rekresai, dan wahana edukasi untuk menunjang Kalifour, sehingga memudahkan pemerintah menyalurkanberbagai sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya objek Kaliofur.

3

Peran Pemerintah Desa Sebagai Dinamisator

Dalam perannya sebagai Dinamisator pemerintah desa mempunyai kemampuan dengan mengkontribusi berupa pendampingan dan pengarahan, Bersama sama dengan warga agar terwujudnya rasa empathy warga agar berpartisipasi pada setiap pembangunan. Adapun hambatan yang ditemui oleh pihak BUMdes Delta Mandiri selaku pengelola Kalifour dalam pengeloaalan Kalifour minimya dana untuk baiaya opsersiaoanl yang didalnmnya meliputi biaya perawatan kebersihan dan pengembangan infrastruktur di area kalifour, Pemerintah semestinya bisa menyelesaikan permasalahan yang dirasakan oleh BUMDes dan bisa mensupport guna mengembangkan potensi-potensi yang terdapat dalam masyarakat serta memperhatikan setiap keluhan baik dari para pengurus BUMDes Delta Mandiri maupaun masyarakat pada umumnya. Pemerintah sebagai penggerak sangat efektif mewujudkan sungai affour sebagai wahana wisata, maka peran pemerintah dalam memberikan dukungan dan arahan benar benar diharapkan sehingga dapat membawa pengaruh masyarakat guna mengubah lingkungan dan mutu taraf hidupnya. Usaha guna mendukung kesuksesan pemberdayaan,pemerintah desa harus dapat membuat dirinya secara aktif turut serta dalam mengoptimalkan kesejahteraan rakyat, pemerintah desa dengan cara rnufakat mampu menggugah dan menggerakkan segala komponen untuk aktif dalam upaya upaya pernbangunan. Berdasarkan analisa peneliti, membuktikan bahwa pemerintah desa sebagai dinamisator telah berusaha mengajak masyarakat agar turut dalam pemberdayaan masyarakat guna mendukung kesuksesan Kali four yang ada di desa Ketapang, dengan menunjuk BUMDes Delta Mandiri secara Lembaga mengelola Kalifour, melalui rapat evaluasi anggotaBUMDes dan masyarakat memberikan pengawasanagar dapat berjalan baik. Meskipun bantuan dana yang diberikan pemerintah desa masih terbatas dan belum optimal karena bergantung pada anggaran yang ditetapka melalui APB Des. Dengan terwujudnya Kalifour peran pemerintah desa sebagai Dinamisator tercermin dari bagaimana warga desa Ketapang digerakan untuk menangkap potensi yang ada bawasannya kalifour adalah peluang usaha/bisnis guna meningkatkan taraf hidupnya(Putri et al., 2022), Karena kalifour diharapkan dapat memberikan perbedaan terhadap peningkatan hidup warga desa (masyarakat) sehingga berdampak pada baik social ekonomi masyarakt maupun peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Pemerintah desa sebagai agen perceparan perubahan dengan membangun infarstrukurdari kondisi sungai yang tidak terawat dan saat ini sudah menjadi kawasan yang bersih,meskipun pengawasan yang berkelanjutan tetap dilakukan.Hal ini berrujuan agar konsistensi kebersihan maupun keasrian bantaran sungai affaour benar benar dilkukan.Menanarnkan kesadarn bagi

masyarakat dalam menjaga lingkungan khususnya dikawasan kalifour tidak dapat dilakukan secara instan, pihak desa maupun BUMDes secara intens berkomunikasi dengan warga agar keberlangsungan kalifour sesuai dengan harapan Bersama bukan hanya harapan bagi para pihak tertentu semata.

3 Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator

Begitu juga sebagai fasilitator pemerintah desa bertindak pada bidang pendampingan lewat pengawasan juga dibidang pembiayaan atau pendanaan melalui pemberian bantuan dana kepada BUMDes Delta Mandiri sebagai pengelola Kalifour. Namun itu semua belum mampu mengoptimalkanke kebutuhan dalam pengembangan Kalifour sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat bahwa Kalifour merupakan salah satu desitinasi kebanggaan bagi warga desa Ketapang. Hal ini juga dapat dimaklumi oleh para pihak khususnya BUMDes Delta Mandiri dimana untuk mengembangkkn asset Kalifour tidak hanya bergantung pada peran pemerintah desa secara sepihak, namun ada cmnpur tangan dari phak luar baik Pemerintah Daerah maupun swasta (investor). Peran pemerintah sebagai fasilitator mempunyai arti penting dalam mendukung keberlangsungan Kalifour yang terletak di desa Ketapang, fasilitator tidak sekedar menitikberatkan pada pemberian fasilitas namun tetap pula melihat dari sarana yang tersedia mengingat kurangnya prasarana seperti tempat bermain, kamar kecil, dan ruang santai bagi pengunjung, selain itu pemerintah juga harus dapat menyampaikan arahan dan motivasi secara intens kepada warga yang sifatnya berkesinambungan dan memberdayakan dengan maksud mereka dapat memprogram, membangun dan mengelolah sendiri fasilitas pemberdayaan, dan dapat menjalankannya secara mandiri kegiatan pendukung lainnya. Sebagai fasilitator, Pemerintah desa Ketapang support penuh memberikan fasilitas kepada BUMDes Delta Mandiri desa Ketapang sebagai pengelola pengembangan kalifour. Fasilitator dalam hal ini mempunyai arti bahwa mengernbangkan pembentukan kalifour dan mendorong supaya BUMDes Delta Mandiri dapat melaksanakan fungsinya sebagai penggerak dan pengoptimalisasi asset desa .. Sebagai fasilitator, Pemerintah Desa berupaya untuk melakukan pengawasan secara langsung di lapangan dan juga memberikan kepada se genap pengurus BUMDes dengan demikian pengurus termotivasi dan lebih profesional. Pemerintah desa Ketapang berdiskusi dengan warga desa tentang keberadaan dan manfaat adanya kalifour yang dikelola oleh pihak BUMDes Delta Mandiri. Pemerintah desa Ketapang juga mendorong BUMDes Delta Mandiri untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam peningkatan atas usaha yang dimiliki desa, serta segala bentuk usaha yang dimiliki, indikator ini melingkupi Peran pemcrintah sebagai fasilitator, yaitu mewujudkan keadaan yang aman dalam terlaksananya pembangunan (memediasi urgensi sebagai pihak ymlg mcmaksimalkan pembangunan dacrak(Labo lo, 20 14).

3 Peran Pemerintah Desa Sebagai Katalisator

Sebagai katalisator dalam hal ini pemerintah desa berkedudukan layaknya sebagai lembaga yang dcngan cepat untuk peningkatan potensi desa. Masalah ini sehubungan dari bagaimana pernerintah desa dalam mengidentifikasi dan mengkondisikan secara langsung dalam hal ini sebagai motorik perkembangan

pembangunan. Sebagai upaya pengoptimalan peran pemerintah desa sebagai katalisator, pemerintah dirasa penting pula untuk mengajak dari pihak lain yang peduli dalam pembangunan prasarana, semisal pihak swasta dan swadaya masyarakat. Pemerintah penting juga mengupayakan untuk berdiskusi dan bekerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Dan yang utama juga yaitu untuk diperhatikan tentang kesiapan pemerintah desa dalam penyediaan pendanaan bagi BUMDes Delta Mandiri, Dalam melakukan perannya Pemerintah Desa sebagai katalisator dengan mewujudkannya kalifour secara tidak langsung memberikan penyediaan sarana dan prasarana bagi masyarakat luas.wahana yang asri sebagai ruang publik yang berfungsi keterkaitannya untuk bersosialisasi maupun rekreasi. Melakukan pengawasan secara langsung terhadap BUMDes Delta Mandiri sebagai pengelola Kalifour sangat dibutuhkan guna memperoleh masukan masukan sekaligus mengevaluasi tentang hal hal apa saja yang diperlukan sebagai penunjang keberlangsungan kalifour kedepan(Adimihardja & Hikmat, 2003). Peran lainnya oleh pemerintah desa yaitu memberikan wawasan kepada warga desa untuk melihat peluang potensi usaha yang dapat dijalankan.Kondisi kebersihan sungai dan sempadan sungai affour bagi pemeirntah desa mempunyai potensi nilai lebih jika diperdayakan dengan optimal, sehingga pihak desa Ketapang merespon dan berkoordinasi dengan pihak BUMDes Delta Mandiri sebagai pihak yang nantinya mengelola dan mengembangkan Kalifour. Dilain sisi pemerintah desa masih berupaya untuk menjalin kerjasama dan berkomunikasi dengan berbagai pihak agar keberlangsungan kalifour tetap eksis dari waktu ke waktu.Pihak desa menyadari bawasannya dalam pengembangan kalifour kedepan tidak cukup hanya menggantungkan dari anggaran desa maupun pemerintah daerah,Dibutuhkan kekuatan kerjasama dengan pihak stakeholder yang lain untuk dijadikan sebagai mitra dalam pengembangan Kalifour. Sebagiaman dengan rancang bangun yang ditetapkan bahwa Kalifour bukan hanya tempat wisata semata namun juga sebagai tempat edukasi bagi masyarakat luas.

1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Kalifour

Pemerintah desa akan dihadapkan pada sebuah kendala kendala selama menjalankan perannya dengan beberapa faktor yang mempengaruhi pada pengembangan Kalifour ini ini bagi menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat Hasil penelitian yang telah dilakukan, dijumpai empat faktor pendukung dalam pengembangan kalifour dalam pengelolaan BUMDes Delta Mandiri yaitu yang pertama, kondisi sempadan sungai affaour sebagai wahana penunjang dalam mewujudkan kalifour yang cukup baik. Faktor pendukung kedua, Adanya sinergi dari lapisan masyarakat yang mendukung dan membantu terwujudnya kalifour sebagai wahana rekreasi dan edukasi sekaligus potensi pengembangan ekonomi bagi warga sekitar. Sedangkan faktor pendukung ketiga, adanya pembinaan yang berkesinambungan ini memperoleh pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Faktor pendukung keempat yaitu adanya bantuan melalui APBDes.

Untuk Faktor Penghambat yang dijumpai oleh BUM Des Delta Mandiri sebagai pengelola kalifour adalah yang pertama, masih minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan terutama dalam hal

pembuangan sampah di kawasan sungai affaour desa Ketapang yang masih sering dilakukan oleh warga. Faktor penghambat yang kedua perhatian masyarakat terhadap potensi kalifour sebagai aset yang semestinya dapat dijadikan sebagai pemberdayaan perekonomian masih rendah. Hal ini dikarenakan minimnya wawasan atas pengembangan sumber daya alam yang dimiliki, karena sesuatu akan mempunyai nilai lebih apabila masyarakat mau dan menyadari bahwa trend saat ini banyak dijumpai di berbagai daerah yang saling menguatkan sumber daya alam menjadi nilai jual khususnya pada bidang pariwisata. Keberadaan kalifour dipandang sebagai tempat yang asri untuk berkumpul. Dengan keberadaan kalifour bisa menjadi peluang potensi peningkatan perekonomian baik Pendapatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) bagi desa maupun bagi masyarakat khususnya dengan membuka usaha (Japak) yang berada di area kalifour. Faktor yang ketiga adalah minimnya dana sebagai biaya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur kalifour.

KESIMPULAN

Peran pemerintah desa Ketapang dalam pengembangan BUMDes Kalifour adalah: Sebagai fasilitator, Pemerintah Desa langsung memberikan pengawasan dilapangan untuk motivasi setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh BUMDes Delta Mandiri, serta melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk menjadikan Kalifour sebagai peluang peningkatan ekonomi dengan membuka lapak usaha., dan 3) Mendorong BUMDesDelta Mandiri untuk bekerjasama dengan berbagai pihak dalam peningkatan berbagai usaha dalam pengelolaan aset, serta segala macam usaha yang dimiliki. Sebagai katalisator dengan memwujudkannya kalifour secara tidak langsung memberikan penyediaan sarana dan prasarana bagi masyarakat luas, wahana yang asri sebagai ruang publik yang berfungsi keterkaitannya untuk bersosialisasi maupun rekreasi. Memberikan wawasan kepada warga desa untuk melihat peluang potensi usaha yang dapat diajalkan. Kondisi kebersihan sungai dan sempadan sungai affour bagi pemerintah desa mempunyai potensi nilai lebih jika diperdayakan dengan optimal. sebagai Dinamisator terciptanya dari bagaimana warga desa Ketapang digerakan untuk menangkap potensi yang ada bawasannya kalifour adalah peluang usaha/bisnis guna meningkatkan taraf hidupnya, Pemerintah desa sebagai agen percepatan perubahan dengan membangun infrastruktur. Faktor pendukung dalam pengembangan kalifour adalah kondisi sempadan sungai affaour sebagai wahana penunjang dalam pembentukan Kalifour, Adanya sinergi dari lapisan masyarakat untuk mendukung terwujudnya Kalifour, adanya kontroling manajemen yang dilaksanakan secara intens baik secara internal maupun eksternal, Adanya pembinaan yang berkesinambungan, serta adanya bantuan dana melalui APB Des. Sedangkan untuk faktor penghambat yang dihadapi adalah minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan, sensitifitas masyarakat kalifour sebagai peluang potensi ekonomi masih rendah, dan masih minimnya dana sebagai biaya pengelolaan serta pengembangan khususnya di bidang infrastruktur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ²² menerima kasih kepada setiap pihak pihak yang telah berperan guna mendukung ⁵ penyusunan jurnal ini ⁵

1. Bapak Dr. Hidayatullah, M.Si selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
2. Bapak Wisnu Panggabeh Salyana, SE, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
3. Ibu Poppy Febiana, M.MedKom, selaku Wakil ⁵ Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
4. Ibu Lailul Mursyidah, M.Pd selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik sekaligus sebagai dosen pembimbing penulis yang sangat berjasa dalam memberikan banyak bekal ilmu pengetahuan tentang dunia karya ilmiah dan dengan sabar membimbing penulis menyusun tugas akhir ini hingga selesai.
5. Ibu Ilmi Usrotin Choiriyah, M.AP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik, yang selalu memberikan informasi terbaru kepada mahasiswanya, sehingga kami selalu mendapatkan update informasi dunia perkuliahan dan info-info lain yang menarik.
6. Kedua Orang tua dan Kakak kakaku yang tiada henti selalu memberikan doa serta motivasi hingga terselesaikannya tugas akhir ini
7. Para sahabat dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini dengan motivasi dan dukungan yang diberikan sungguh luar biasa.
8. Someone Who Makes Me Happiness In My Heart

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adhiantardja, K., & Hidayat, I. H. (2003). *participatory research approach dalam Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Kemasyarakatan*
- Am, H. (2006). Ilmu Pengetahuan Sosial (konsep Pemberdayaan masyarakat), Jakarta: Erlangga.
- Anwar, H. (2020). Peranan Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. *Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Labo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan (suatu kajian, teori, konsep dan pengembangannya)*.

Rajawali: Pers

- Larasati, D. C. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Wisata Hutan Pinus Usuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bendosan, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. *Reflexivasi*, 9(2), 161-167.
- Laru, F. H. U., & Suprojo A. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 367-371.
- Nur Amalia Reska, N. (2019). PERAN MANAJEMEN PERHUBUNGAN TENTANG TURAN PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BUSAT NIAGA KOTA PALOPO. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Nuridin, M., Nurmaeta, S., & Tahir, M. (2014). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di Kecamatan Biringbulu kabupaten Gowa. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1).
- Putri, H. N., Resmana, S., Atthahara, H., & Aryani, L. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(10), 353-358.
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *GOVERNANCE*, 1(2).
- Sekamo, S. (2002). Pemerintah: Tugas Pokok dan Fungsi. *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Sugiyono, D. (2010). *Memahami penelitian kuantitatif*.
- Yerawati, T. A. (2003). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. *Makassar: Universitas*, 45.
- Yani, A., Marlina, S., & Lestiyani, T. E. K. (2019). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA TANJUNG LAMJUT KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBANG. UIN Sulthan Thaha Saifuddin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai
Peraturan Desa Ketapang Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDes) periode Tahun 2021-2026, dalam RPJMDes

Jurnal

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

20%
INTERNET SOURCES

10%
PUBLICATIONS

%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	4%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3%
3	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	2%
4	adoc.pub Internet Source	1%
5	pdfcoffee.com Internet Source	1%
6	eprints.polbeng.ac.id Internet Source	1%
7	ainundullah.blogspot.com Internet Source	1%
8	jurnal.peneliti.net Internet Source	1%
	ojs.uho.ac.id Internet Source	1%

10	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
11	media.neliti.com Internet Source	<1 %
12	eprints.polsri.ac.id Internet Source	<1 %
13	ejournal.unuja.ac.id Internet Source	<1 %
14	Ranaswijaya Ranaswijaya. "Pemberdayaan UMKM Dalam Menstabilkan Perekonomian Daerah Rejang Lebong di Tengah Pandemi Covid-19", Disclosure: Journal of Accounting and Finance, 2022 Publication	<1 %
15	repo.apmd.ac.id Internet Source	<1 %
16	journal.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.mercubuana.ac.id Internet Source	<1 %
18	eprints.umpo.ac.id Internet Source	<1 %
	perspektif.ppj.unp.ac.id Internet Source	<1 %

20	repository.ummat.ac.id Internet Source	<1 %
21	jurnal.unka.ac.id Internet Source	<1 %
22	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
23	blog.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
24	ejournal.ipdn.ac.id Internet Source	<1 %
25	eprints.umsida.ac.id Internet Source	<1 %
26	www.ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	<1 %
27	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
28	Ilmi Usrotin Choiriyah, Mokhamad Yusuf Chabibi. "Keuntungan Relatif dalam Inovasi Pelayanan Pengaduan Kerusakan Jalan Melalui Aplikasi M-Bonk", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2020 Publication	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off